

## DANA DESA 2025

# 20 Persen Harus Dialokasikan untuk Ketahanan Pangan

### PENGASIH (KR)

Meski Dana Desa (DD) hingga saat ini belum turun ke daerah, tetapi Pemerintah Kalurahan harus sudah membuat Peraturan Kalurahan (Perkal) yang mengalokasikan 20 persen dari DD tersebut untuk Ketahanan Pangan.

Kebijakan ini memang baru pertama kalinya akan dilaksanakan tahun 2025. Diprediksi untuk DD tahun 2025 Kulonprogo akan mengalami penurunan pagu dibanding 2024 yang sebesar Rp 105 Miliar.

Hal itu diungkapkan Muhadi SH MHum Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo. "Kebijakan Pe-



KR-Widiasuti

### Muhadi SH MHum

merintah Pusat itu akan dilaksanakan 2025 ini dengan skema Ketahanan Pangan 20 persen yang menggunakan anggaran dana Desa. Skema 20 persen itu arahnya adalah sesuai dengan ketentuan Permendes No 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa 2025,"

ucap Muhadi, Jumat (7/2).

Intinya, penerima utama 20 persen adalah Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) bila siap, atau BUMKal Bersama dalam lingkup kapanewon. Tetapi bila BUMKal dan BUMKal Bersama tidak siap, maka sesuai kebijakan pusat, di lembaga ekonomi kalurahan lainnya, Tim Pelaksana Kegiatan Khusus (TPKK) di bidang ketahanan pangan yang dibentuk lurah, dan ketika sudah siap akan diserahkan ke BUMKal.

Mengawali kebijakan tersebut harus ada musyawarah kalurahan yang menentukan prioritas ulang, bila sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan (Perkal), maka konsekuensi

harus merubahnya dan setelah ditentukan maka untuk menatanya. Ketahanan pangan yang dimaksud itu pertanian dalam arti luas termasuk sarana pendukungnya. Ketahanan pangan tidak harus dengan nanam padi, palawija, tetapi misal berkreaitif membeli alat mendukung produksi pertanian seperti traktor, ini merupakan untuk mendukung proses produksi, pertanian dalam arti luas, bisa pula peternakan, perikanan.

Diakui Muhadi, memang masih banyak persepsi yang belum sama. Tetapi pihaknya sudah membuat Edaran kepada 87 kalurahan terkait itu. Intinya ketika BUMKal sudah mapan dan sehat, 20 persen DD bisa dikelola mereka. (Wid)